

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KETAATAN PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada OPD Di Indragiri Hilir)**

Shara Carolina¹⁾, Yesi Mutia Basri²⁾, Julita²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: sharacarolina06061996@gmail.com

*The Effect of Budget Goal Clarity, Control Accounting, Reporting System And
Obedience to the Laws and Regulations on the Performance Accountability Of
Government Institution*

(Empirical studies on the Government of Indragiri Hilir District)

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of budget goal clarity, control of accounting, reporting systems and the adherence of the law regulation on the performance accountability of government performance. The sampling technique used purposive sampling. The method of collecting data through questionnaires was given directly to the head of office staff, head of subdivision and finance of the planning subdivision in all Regional Organization Organizations (OPD) in the Indragiri Hilir Regency Government. The data obtained were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) through SPSS 25 software. The results of empirical studies show that (1) budget goal clarity had a significant and positive affect to performance accountability of government performance with a significance value of $0.008 < 0.05$, (2) control of accounting had a significant and positive affect to performance accountability of government performance with a significance value of $0,015 < 0,05$, (3) reporting systems had not significantly but positive affect to performance accountability of government performance with a significance value of $0,005 < 0,05$ (4) the adherence of the law regulation had not significantly but positive affect to performance accountability of government performance with a significance value of $0,836 < 0,05$.

KeyWords : budget goal clarity, control of accounting, reporting systems, the adherence of the law regulation, the performance accountability of government performance.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (PERMENPAN,2013).

Menurut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 atas LAKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Agam diberikan predikat C (skor >30-50%) atau agak kurang dan pada tahun 2018 kategori CC (50-65%) cukup baik. Maksudnya disini adalah Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan kualitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pada setiap OPD dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Variabel bebas pertama dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010).

Variabel bebas kedua adalah pengendalian akuntansi (*accounting control*). Kusumaningrum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan

merupakan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2004).

Variabel bebas keempat ialah ketaatan perturan perundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertipkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang dan peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. (Soleman: 2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam mentaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengukur dan menertipkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Herawaty (2011) dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil penelitian Herawaty (2011) menyatakan bahwa secara parsial variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sedang kan variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menambahkan satu variabel dari penelitian Lumenta (2016) yaitu ketaatan peraturan perundangan dengan hasil penelitian bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1). Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2). Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3). Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4). Apakah ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun tujuan penelitian adalah (1). Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Indragiri Hulu. (2). Mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Indragiri Hulu. (3). Mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Indragiri Hulu. (4). Mengetahui pengaruh ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Indragiri Hulu.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (PERMENPAN, 2013).

Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dengan ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter (Mardiasmo, 2002:61).

Pengertian Penegndalian Akuntans

Pengendalian intern menurut (Mulyadi, 2016:129) Penegndalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem petanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2014).

Pengertian Ketaatan pada Peraturan Perundangan

(Soleman:2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam mentaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengukur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sasaran anggaran yang ditetapkan juga harus diperhatikan. Sasaran anggaran harus ditetapkan secara jelas dan spesifik agar dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Kurangnya kejelasan sasaran anggaran mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana yang berakibat pada penurunan kinerja. Selain ditetapkan secara jelas dan spesifik, tingkat kesulitan sasaran anggaran juga

harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sasaran anggaran harus ditetapkan pada tingkat kesulitan yang masih dimungkinkan untuk dicapai, agar manajerial termotivasi untuk merealisasikan anggaran dan bekerja lebih efisien sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang dilakukan pemerintah daerah maka semakin baik tingkat ekonomis, efisien yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.

H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik tingkat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik kedepannya.

H3: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketaatan pertutan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemeintah. Hal ini membuktikan bahwa semakin patuh pegawai intansi pemerintah terhadap peraturan perundangan yang ada maka baik pula pertanggungjawabn atau akuntabilitas kerja intansi pemerintah.

H4: Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Variabel Independen

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Permenpam, 2013). Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan instrumen yang di kembangkan oleh Anjarwati (2012) dengan 10 item pernyataan dan diukur dengan menggunakan indikator variabel, yaitu pemahaman kejelasan sasaran anggaran suatu program, penetapan visi dan misi sesuai dengan rencana strategik organisasi, penetapan indikator kinerja untuk setiap kegiatan, analisis keuangan, pembuatan laporan keuangan, pengecekan jalannya program, pengendalian pelaksanaan kegiatan, akomodir setiap perubahan pada kegiatan, kegunaan LAKIP dan

kaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas penacapaian sasaran tersebut (Bastian, 2010). Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Anjarwati (2012) dengan 8 item Pernyataan dan diukur menggunakan indikator variabel, yaitu kejelasan rencana kerja dan anggaran, kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan RAPBD, sasaran anggaran yang jelas dan spesifik, keahlian dan pengetahuan, faktor yang mendukung tujuan-tujuan instansi, ketepatan anggaran dengan realisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif dan tahun anggaran sebagai harapan dan evaluasi kinerjabagi instansi.

3. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian atau kontrol akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery,2009). pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efesiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Anjarwati (2012) dengan 9 item Pernyataan dan

diukur dengan menggunakan indikator variabel, yaitu audit sebagai alat pengambilan keputusan, evaluasi sistematis, target anggaran sebagai alat pengambilan keputusan, jangka waktu sebagai alat pengambilan keputusan, otorisasi pada transaksi, bukti pendukung setiap transaksi, pencatatan transaksi, pembaharuan catatan akuntansi dan persetujuan laporan keuangan oleh kepala bagian keuangan.

4. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem petanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2014). Variabel sistem pelaporan diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Anjarwati (2012) dengan 5 item Pernyataan dan diikuti dengan menggunakan indikator, yaitu penyajian laporan keuangan secara lengkap, informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, laporan keuangan dapat diuji dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

5. ketaatan peraturan perundangan

Menurut Mardiasmo (2002:165). Unit pemerintah memiliki keandalan khusus dalam

melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang terus meningkat, misalnya undang-undang peraturan pemerintah, dan sebagainya masyarakat pemilih, legislatif, lembaga pengawas, dan memberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.

Variabel ketaatan peraturan perundangan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Lumenta, Morasa, dan Mawikere, 2016) dengan 7 item Pernyataan dan diukur dengan menggunakan indikator variabel, yaitu ketaatan peraturan perundangan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, pemberian sanksi kepada pihak yang tidak menaati peraturan, kesesuaian pelaksanaan AKIP dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan dan kinerja instansi dalam PP No. 8 Tahun 2006, pedoman pembuatan laporan keuangan dalam PP No. 71 Tahun 2010 (laporan keuangan harus relevan, handal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami) dan pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 21 tahun 2011.

Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) poin skala likert dimana poin 1 (satu)

menunjukkan Sangat tidak setuju (STS), 2(dua) menunjukkan Tidak setuju (TS), poin 3(tiga) menunjukkan Netral (N), poin 4(empat) menunjukkan Setuju (S), dan poin 5 (lima) menunjukkan Sangat setuju (SS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukakan pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 31 OPD. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengambilan data dengan membagikan kuisisioner kepada kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian perencanaan. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengujian data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, serta menggunakan uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu

kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2013). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel uji signifikan di lakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, dimana r tabel dapat di peroleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$ (signifikan 5%). jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka dapat di simpulkan bahwa variabel tidak valid (Ghozali,2013).

Uji Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika di jawabn seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2013). Pengukuran reabilitas bisa dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* (α) suatu variabel dilakukan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* $>$ 0,06 (Ghozali,2013).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdapat model regresi yang digunakan dalam penelitian dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonientas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,2013). Metode yang digunakan adalah dengan statistik *kolmogorov smirnov*. Alat uji ini biasa di sebut dengan k-S yang tersedia dalam program *For windows*.Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikan yang dapat dalam tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan bedistribusi normal bila $sig > 0,05$ (Ghozali,2013).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu metode regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal(Ghozali,2013). Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2013)..

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterosdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastisits. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskesastisitas dilakukan dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tindakan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat tindakan pola tertentu pada grafik. *scatterplot* antara RSESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diperiksa, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-tik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur yang benar (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka di indikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas(Ghozali,2013).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah:

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan). T_{tabel} dilihat dengan derajat bebas = $n-k-1$, atau apabila tingkat $sig < \alpha$ 0,05 maka variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan, atau apabila tingkat $sig > \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Presentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:46).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian kuesioner Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap OPD. Kuesioner dikirim sebanyak 93 kuesioner yang kembali sebanyak 72 kuesioner (77,42%). Kuisisioner yang tidak kembali sebanyak 21 kuisisioner (22,58%).

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 72 jawaban kuesioner responden di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Deskriptif statistik

	N	Mini mum	Maxi mum	Me an	Std. Devi ation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72	38	50	44,60	3,359
Kejelasan Sasaran Anggaran	72	30	40	35,82	2,708
Pengendalian Akuntansi	72	33	45	40,26	3,140
Sistem Pelaporan	72	17	25	21,79	2,282
Ketaatan Peraturan Perundangan	72	24	35	30,74	2,578
Valid N (listwise)	72				

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan variabel dependen yang mempunyai nilai minimum total jawaban responden

adalah 38, nilai maximum total jawaban responden adalah 50, nilai rata-rata jawaban responden adalah 44,60 dan memperoleh standar deviasi 3,359.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Item Pernyataan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,878	10
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,799	8
Pengendalian Akuntansi	0,800	9
Sistem Pelaporan	0,849	5
Ketaatan Peraturan Perundangan	0,803	7

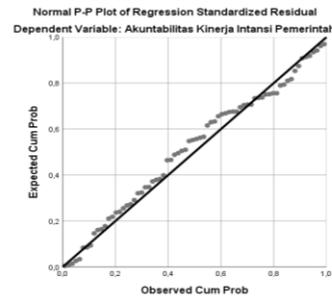
Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan yang menunjukkan *cronbach alpha* antara lain 0,878, 0,799, 0,800, 0,849, dan 0,803. Dari semua nilai ke enam variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah *reliable*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 2
Normal Probability Standardized Residual



Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencah dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji T dan Uji R² dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

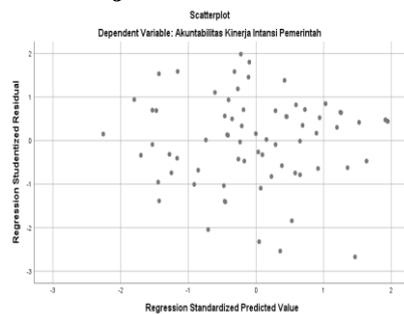
Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,713	1,403	Bebas Multikolinearitas
Pengendalian Akuntansi	0,705	1,419	Bebas Multikolinearitas
Sistem Pelaporan	0,857	1,167	Bebas Multikolinearitas
Ketaatan Peraturan Perundangan	0,899	1,113	Bebas Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber : Data Olahan, 2019

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : *Data Olahan, 2019*

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah sebagai berikut.

$$AKIP = 10,889 + 0,373 + 0,295 + 0,427 - 0,026 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Maka diperoleh nilai R sebesar 0,656 atau 65,6% dan R^2 sebesar 0,430 atau 43%. memberi penjelasan bahwa 43% Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di pengaruhi oleh (Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan) sedangkan 57% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih

terdapat faktor individual lain sebesar 57% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang belum diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Koefisien

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,752 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan Haditerima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian yang di lakukan Herawaty (2011) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan memperjelas dan bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawati (2011), Beny Arifi W (2012), Eko Setiawan(2013), Wahyuni(2014),

Siti Ruri Suhaesta (2016), Lusiana Kanji (2016) dan Ferawati, Abdulah Kahar dan Muh.Ikbal A(2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,506 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan Haditerima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang dilakukan pemerintah daerah semakin baik tingkat ekonomis, efisien yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawati (2011) Eko Setiawan(2013), Wahyuni(2014) dan Siti Ruri Suhaesta (2016) menyatakan bahwa

pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,909 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan Haditerima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian yang dilakukan Herawaty (2011) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik tingkat pertanggung jawaban pemerintah kepada publik dalam menyajikan laporan keuangan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawati (2011), Afilu Hidayathullah, Irine Herdijono(2015), Siti Ruri Suhaesta (2016) dan Reyhan Handy Fauzan (2017) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis keempat (H4)

Diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $3,174 < 1,996$ dengan nilai

signifikansi sebesar $0,836 > 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar $0,836$ dan tingkat kesalahan (α) sebesar $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2016) menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa semakin patuh pegawai instansi pemerintah terhadap peraturan perundangan yang ada maka baik pula pertanggungjawaban atau akuntabilitas kerja instansi pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lumenta (2016) menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN, IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan.
2. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten Indragiri Hilir dengan 31 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja.
3. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing responden.
4. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu kejelasan

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, system pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan sehingga belum memberikan kesimpulan yang menyeluruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Saran-saran yang dapat diberi kan oleh peneliti bagi kesempurnaan peneliti selanjutnya yaitu.

1. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kinerja manajerial.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan populasi agar dihasilkan hasil yang lebih konsisten.
3. Penelitian selanjutnya disarankan Perlu melakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
4. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi variabel independen lainnya untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kinerja manajerial, penerapan akuntabilitas keuangan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi.

Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001.

2. Implikasi praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memeberikan pertimbangan bagi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir agar dapat meningkatkan ketepatan dalam menentukan sasaran anggaran dan efektivitas dalam penerapan pengendalian akuntansi. Selain itu juga harus memperbaiki sistem pelaporan agar menjadi lebih baik agar akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta.
- Kusumaningrum, Indrawati. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng*. Tesis. Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang
- Hery. 2009. *Teori akuntansi*. Jakarta Kencana
- Abdullah Halim. 2004 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Herawaty Netty 2011 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humanioa . Volume 2, Hl 31-36 Issn 08528349, Jurnal. Jambi Universitas Jambi
- Lumenta ,Agnestasia Laura, Jenny Morasa Dan Lidia Mawikere 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Vol 4 No 3 September 2016 Issn 23031174. Jurnal. Minahasaa. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo.2002. Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi : Yogyakarta
- Mulyadi. 2016 Sistem Kuntansi. Penerbit Saemba Empat, Jakarta
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh kompensasi, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan. terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Desetrasi. Unpad. Bandung
- Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1-7. doi:ISSN 2252-6765.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universal Diponegoro, Semarang